BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk lembaga pemerintahan maupun masyarakat adalah dapat mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology atau ICT*) di dunia telah semakin luas.

ICT ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Kelebihan dari *ICT* ini adalah dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah, sehingga mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.

Perkembangan internet sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia, hampir semua instansi pemerintahan mulai menggunakan sistem *online* untuk melakukan *input* atau *output* data. Hal tersebut menjadi sebuah gambaran betapa berkembang pesatnya suatu jaringan internet di instansi-instansi pemerintahan saat ini. Perkembangan teknologi khususnya internet membawa kita kedalam dunia yang serba canggih, serba cepat dalam melakukan aktivitas apapun.

Untuk sekarang dan beberapa tahun kedepan gaya hidup masyarakat tidak akan terlepas dari internet karena kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan *ICT* dalam *volume* yang besar secara cepat dan akurat. *ICT* dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.

Kebijakan untuk mengembangkan *ICT* dilakukan oleh pemerintah daerah secara baik, karena menginginkan pelayanan yang baik untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada. *ICT* sudah menjadi bagian yang sangat signifikan dalam perkembangan teknologi saat ini, perkembangan teknologi informasi dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan akan teknologi dan sistem informasi yang akurat, efektif dan efisien.

ICT dibuat agar mempermudah dalam pengelolaan data maupun informasi serta memudahkan kita dalam mencari data maupun informasi tersebut, kemajuan teknologi informasi yang pesat serta ini seharusnya menjadi potensi dalam pemanfaatannya secara luas. Membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat dalam hal ini *ICT* harus bisa menjadi manfaat besar bagi penggunanya.

Seiring dengan perkembangan *ICT*, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sedang melakukan pelaksanaan sistem baru pada proses pembuatan KTP yang telah dilakukan secara *online*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah unsur

Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Selain melayani pembuatan KTP *Online* yang bersifat *Intern*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta mempunyai produk layanan seperti ganti nama, akta kelahiran, akta kematian, akta pangakuan dan pengesahan anak, akta pengangkatan anak, akta penceraian, akta perkawinan, jenis layanan kependudukan dan salinan akta.

Awalnya pada akhir Bulan Januari Tahun 2009 pelaksanaan pembuatan KTP secara *Online* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta hanya terdapat pada Kecamatan-kecamatan saja. Hal ini mengakibatkan proses pembuatan KTP, masyarakat/ diwakili oleh aparatur Desa untuk datang ke Kecamatan yang cukup lama dan membutuhkan biaya transportasi. Kemudian dari awal Januari Tahun 2011 mulai di terapkan KTP *online* di Desa-desa, yaitu untuk mempercepat proses pembuatan KTP yang tidak perlu waktu yang banyak, dengan Proses pembuatan KTP *Online* yang bersifat *Intern*. Oleh karena itu masyarakat hanya butuh waktu 10 menit sampai pembuatan KTP selesai.

KTP *Online* saat ini telah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Lalu, Peraturan Bupati Purwakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal ini dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta

Nomor 18 Tahun 2007, tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Tetapi dalam penampilan data dibatasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari pemanfaatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada dasarnya pengelolaan KTP adalah suatu satu bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga menjadikan program KTP *online* sebagai salah satu program yang strategis dan penting kontribusinya untuk keberhasilan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

Tujuan dari KTP *online* ini adalah untuk mempermudah dalam proses pembuatan KTP baru maupun pembuatan KTP hilang dan perpanjangan KTP. Hal ini juga mempermudah dalam pencarian data dan informasi mengenai penduduk atau seseorang, karena dalam KTP *online* ini data yang dibuat akan langsung terkoneksi dalam data *based*.

KTP merupakan salah satu bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap penduduk diatas 17 tahun, atau telah/ pernah menikah wajib memiliki KTP, masa berlaku KTP bagi yang berusia 17 tahun sampai dengan usia dibawah 60 tahun adalah 5 tahun. Bagi penduduk yang berusia diatas 60 tahun masa berlaku KTP adalah seumur hidup, KTP diterbitkan untuk permohonan baru, terjadi perubahan data, rusak, hilang dan habis masa berlakunya.

Proses pembuatan KTP *Online* yang bersifat *Intern* pada masyarakat melakukannya melalui beberapa tahap, mulai dari RT / RW, Kantor Kelurahan atau Desa sampai dengan Kantor Kecamatan. Tahapan-tahapan tersebut sering

memakan waktu yang cukup lama dan tidak hanya itu pada saat proses pendaftaran permohonan pembuatan KTP di Kantor Desa/ Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

Ada juga syarat perpanjang KTP *Online* yang bersifat *Intern* di antaranya, *Pertama,* mengisi formulir registrasi secara lengkap (Perpanjangan tidak akan diproses jika belum lengkap). *Kedua, scan foto* / menggunakan *foto digital* dalam *format jpeg*, Maksimal 200 KB. (Untuk tahun lahir ganjil menggunakan latar belakang merah, untuk tahun lahir genap menggunakan latar belakang biru). *Ketiga, scan* tanda tangan menggunakan latar belakang putih polos dalam bentuk *format jpeg*, maksimal 200 KB. *Keempat*, menyiapkan KTP yang sudah habis masa berlakunya untuk diambil oleh petugas pengantar KTP. *Kelima*, menyiapkan *foto copy* KK untuk diambil oleh petugas pengantar KTP. *Keenam,* mengisi nomor telepon / HP yang bisa dihubungi untuk konfirmasi lebih lanjut. *Ketujuh*, sebelum melakukan pendaftaran masyarakat harus sudah memiliki Kartu Keluarga (KK).

Sebelum KTP *Online* ada sering terlihat antrian panjang yang banyak di temukan jika pembuatan KTP dilaksanakan di Kecamatan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, serta dapat terjadinya pungutan liar dengan alasan untuk mempercepat proses pembuatan KTP, hal tersebut tentunya merugikan masyarakat banyak.

Pelayanan yang cepat diperlukan oleh masyarakat berarti bahwa setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara *(mediasi*) apapun.

Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi *digital* menjadi suatu tuntutan, penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.

KTP *Online* yang dilakukan secara terpadu, tertib dan berlanjut serta dikelola secara profesional dengan memanfaatkan dan memadukan unsur-unsur fungsional, saran dan prasarana baik secara *intern* maupun *ekstern*. Serta tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya, akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah.

KTP *Online* yang di harapkan melayani masyarakat sesuai yang diharapkan secara cepat, tepat, akurat, *relevan*, mutakhir. Serta dapat dipercaya dan terpilih sesuai dengan kebutuhan pimpinan, pengelola dan pengguna di setiap tingkatan wilayah. Harapan ini untuk membawa Kabupaten Purwakarta ke arah yang lebih baik dar bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun pelayanan KTP *Online* ini masih mempunyai kendala yaitu masih ada daerah yang menemui kendala jaringan sehingga perangkat tidak bisa dioperasikan dan pelayanan pembuatan KTP *Online* gratis tidak maksimal. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta hanya menyediakan operator dan perangkat, kalau jaringan adalah urusan pihak Hubungan Antar Lembaga (Hubtarga) Setda Kabupaten Purwakarta yang sudah bekerja sama dan memberdayakan fasilitas yang ada yaitu Telkom dan Telkomsel.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **"ANALISIS KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) *ONLINE* DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perumusan masalah dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana peramalan kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ?
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ?
4. Bagaimana pemantauan kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ?
5. Bagaimana penilaian kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk analisis kebijakan kartu tanda penduduk (KTP) *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perumusan masalah dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui peramalan kebijakan kolektif dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui rekomendasi kebijakan di instansi terkait analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui pemantauan kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui penilaian kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang pelaksanaan proses penelitian mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai ajang Analisis ilmu-ilmu

ataupun teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan. Banyak hal baru yang ditemukan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga menambah pengetahuan dan dapat secara langsung menerapkan dari berbagai teori yang dipelajari sangat idealis.

2. Secara teoritis, Penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai program studi yang dipelajari di Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu bagi Pemerintahan serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penelitian.
3. Secara praktis, penelitian yang dilakukan dengan cara pencarian data langsung ke sumber data yang bersangkutan, dapat memberikan kegunaan bagi instansi yaitu Pemerintah Kabupaten Purwakarta itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan para aparatur Pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dapat mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan analisis kebijakan KTP *Online* serta dapat memberikan Penelitian yang dapat memberikan masukan-masukan yang diharapkan akan memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Suatu negara memerlukan adanya kebijakan untuk mengatur pemerintahan. Kebijakan yang dibuat pemerintah ditujukan untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Menurut Joko Widodo definisi analisis di dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik* melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (Widodo, 2009:13).

Berdasarkan pengertian tersebut maka analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui penyelidikan sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Pemerintah yang selalu mempunyai kebijakan dalam menjalankan kepentingan untuk kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Edi Suharto dalam bukunya *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* bahwa: "Kebijakan adalah sebuah *instrument* pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik" (Suharto, 2008:03).

Berdasarkan pengertian konsep Analisis kebijakan tersebut memberikan keterangan bahwa kebijakan yang ada dengan dasar yang kuat, dalam proses implementasinya haruslah memiliki arah tujuan yang benar-benar jelas, hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada.

Proses analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* adalah : "suatu aktivitas intelektual yang praktis yang di tujukan untuk menciptakan secara kritis

menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan" (Dunn, 1998:44).

Berdasarkan pengertian di atas maka analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dan dalam proses pembuatan kebijakan. Analis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Analisis tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengabilan keputusan oleh pemerintah.

Karakter dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* adalah : "Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yaitu dengan langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program atau melalui formasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut"(Nugroho, 2004:158).

Berdasarkan pengertian karakter analisis kebijakan tersebut memberikan keterangan bahwa analisis kebijakan yang ada dengan dasar yang kuat, dalam proses analisisnya haruslah memiliki arah tujuan yang benar-benar jelas, hal tersebut tidak lain untuk kebijakan publik terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi sebagai Sifat dari masalah-masalah itu sendiri berpengaruh terhadap analisis program-program yang didesain untuk memecahkan masalah tersebut dengan berbagai cara, diantaranya yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1998:25) dalam bukunya *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* yang mengajukan Lima faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu analisis kebijakan tersebut adalah :

1. Perumusan Masalah Kebijakan, yaitu dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan Masalah Kebijakan terdiri dari beberapa indokator yaitu :
    a. Analisis Batas, yaitu memperkirakan apakah sistem formulasi masalah individual yang kita sebut *metaproblem* relatif lengkap.
    b. Analisis Klasifikasi, yaitu teknik untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan kondisi permasalahan.
    c. Analisis Hirarki, yaitu teknik untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah.
    d. *Synecties,* yaitu suatu metode yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah yang bersifat analog.
    e. *Brainstorming,* yaitu metode untuk menghasilkan ide-ide dan tujuan yang membantu untuk mengidentifikasi masalah.
    f. Analisis perspektif berganda, yaitu metode untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai masalah-masalah dan peluang pemecahan secara sistematis.
    g. Analisis asumsi, yaitu teknik yang bertujuan mensintesiskan secara kreatif asumsi-asumsi yang bertentangan dengan masalah kebijakan.
    h. Pemetaan argumentasi, yaitu teknik yang menggabungakan pendapat-pendapat dengan informasi bebijakan yang sama, akan menghasilkan pengetahuan yang bertentangan.

Berdasarkan perumusan masalah kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan menambah pengetahuan yang *relevan* dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah kebijakan.

2. Peramalan Kebijakan, yaitu meyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari di ambilnya alternatif. Peramalan Kebijakan terdiri dari beberapa indokator yaitu :
    a. *Proyeksi*, yaitu ramalan yang didasarkan kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan dan dapat diperkuat dengan pendapat-pendapat para otoritas.
    b. *Prediksi,* ramalan yang berdasarkan pada asumsi teorretik yang tegas.

c. Perkiraan, ramalan yang didasarkan pada penilaian informasi atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan.

Berdasarkan Peramalan Kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan meyediakan pengetahuan yang *relevan* dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari di ambilnya alternatif.

3. Rekomendasi Kebijakan, yaitu membuahkan pengetahuan yang *relevan* kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diterapkan melalui peramalan. Rekomendasi Kebijakan terdiri dari beberapa indokator yaitu :
   a. Pengambilan Keputusan Tunggal, yaitu pilihan yang harus dibuat oleh satu orang saja, yang dapat mempengaruhi orang banyak.
   b. Kepastian, yaitu hasil pilihan yang harus diketahui dengan pasti.
   c. Kecepatan, yaitu hasil tindakan harus segera terjadi.

Berdasarkan Rekomendasi Kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan membuahkan pengetahuan yang *relevan* kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diterapkan melalui peramalan.

4. Pemantauan Kebijakan, yaitu menyediakan pengetahuan yang diambil dari kebijakan sebelumnya. Pemantauan Kebijakan terdiri dari beberapa indokator yaitu :
   a. Kepatuhan, yaitu untuk menetukan apakah tindakan para aparatur sesuai standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator.
   b. Pemeriksaan, yaitu membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran.
   c. Akuntansi, *monitoring* menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi.
   d. *Ekplanasi*, yaitu pemantauan juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda.

Berdasarkan Pemantauan Kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan menyediakan pengetahuan yang diambil dari kebijakan sebelumnya.

5. Penilaian Kebijakan, yaitu membuahkan pengetahuan yang *relevan* dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar yang dihasilkan.
    a. Evaluasi Semu, yaitu menghasilkan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan.
    b. Evaluasi *Formal*, yaitu menghasilkan informasi *valid* dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar program kebijakan.

(Dunn, 1998:25).

Berdasarkan Lima faktor analisis kebijakan di atas maka, analisis kebijakan terdiri dari beberapa tahapan dan metode yang dilaksanakan. Bermanfaat bagi analis sebagai pedoman utama dalam menghasilkan atau mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

E-Government merupakan suatu kemajuan pemerintah dalam program-program yang utama saat ini. Menurut Oliver Wendell Holmes dalam bukunya *Sains & Teknologi Jilid 2* menjelaskan pengertiannya yaitu :“Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya”(Holmes, 2000:2).

Definisi tersebut mengatakan bahwa *E-Government* adalah pelayanan yang sudah mengalami pemprosesan dimana yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan secara langsung mengalami proses pengolahan dapat mengefisienkan biaya, hal tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi informasi yang berguna.

Melengkapi teori tersebut yang di uraikan mengenai pengertian sistem, data dan informasi, melengkapi pandangan tersebut, maka diuraikan mengenai sistem, data dan informasi, M. Khoirul Anwar dalam buku *SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah* menjelaskan pengertian sistem, sistem adalah "seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan"(Anwar, 2004:4). Dimana satu dengan yang lain saling mendukung untuk terlaksananya sistem tersebut sehingga menjelaskan bahwa sistem yang ada tidak dapat berdiri sendiri dimana dalam sistem harus ada keterkaitan yang menjadi pengikat sistem itu sendiri.

Pendapat yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa sistem merupakan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Bedasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa sistem itu merupakan suatu kesatuan rangkaian kerja yang dapat menghasilkan sesuatu dari hasil rangkaian-rangkaian tersebut. Sesuatu yang dihasilkan oleh rangkaian-rangkaian tersebut tidak lain adalah data.

Merencanakan dan menganalisa perancangan suatu sistem terlebih dahulu harus mengatahui lebih dahulu mengenai komponen-komponen yang ada dalam 10 sistem tersebut baik itu tentang data dan informasi. Keterkaitan data dan informasi sangatlah erat sebagaimana hubungannya antara sebab dan akibat. Dikatakan bahwa data merupkan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan informasi merupkanan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengelohan data. Menurut pendapat Gordon B Davis mengatakan bahwa informasi sebagai "data

yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang"(Davis, 2002:28).

Definisi tersebut mengatakan bahwa informasi yang ada adalah data yang sudah mengalami pemprosesan dimana yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan secara langsung akan tetapi setelah mengalami proses pengolahan, data tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi informasi yang berguna.

Hal ini akan memudahkan dalam perencanaan dan pengembilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Ladjamudin dalam bukunya: *Analisis dan desain Sistem Informasi*, bahwa: sistem informasi merupakan "sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat pelaksanaan akan memberi informasi bagi pengambil keputusan dan/ atau untuk mengendalikan organisasi"(Ladjamudin, 2002:13). Dengan demikian suatu organisasi mendukung kegiatan yang ada dengan perencanaan dan dan ketepatan waktu sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Suatu informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, dan suatu informasi mengambarkan 13 kejadian-kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dengan menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan pengawasan hasil pengolahan tersebut. Mc Leod suatu informasi berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut dianggap.

b. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
c. *Relevan* artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
d. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan"

(Mc Leod, 2001:61).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti menyusun definisi operasional sebagai berikut :

1. Analisis kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas intelektual yang praktis yang di tujukan untuk menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan.
2. KTP *Online* adalah sistem yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan berupa data kependudukan di tiap Kecamatan dan Desa yang berdasarkan *ICT*.
3. Analisis kebijakan KTP *Online* adalah suatu aktivitas intelektual dalam proses kebijakan diterapkan pada prakteknya bukan sekedar teori yang dilakukan melalui sistem yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan berupa data kependudukan secara *Online*.

Adapun metode-metode dalam Analisis kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Perumusan Masalah Kebijakan adalah teknik yang dapat menambah pengetahuan yang *relevan* dengan kebijakan yang mempersoalkan

asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan pelaksanaan KTP *Online* melalui penyusunan agenda. Perumusan Kebijakan ini terdiri dari metode-metode yaitu :

a. Analisis Batas adalah suatu teknik untuk memperkirakan apakah sistem formulasi dalam pelaksanaan KTP *Online* terdapat masalah individual yang kita sebut *metaproblem* relatif lengkap.
b. Analisis Klasifikasi adalah suatu teknik untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam KTP *Online* KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan kondisi permasalahan.
c. Analisis Hirarki adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin ada dari suatu masalah pada KTP *Online* KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
d. *Synecties* adalah suatu teknik yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah yang bersifat analog yang terdapat dalam KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
e. *Brainstorming* adalah suatu tenik untuk menghasilkan ide-ide dan tujuan yang membantu pelaksanaan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mengidentifikasi masalah.

f. Analisis perspektif berganda adalah suatu metode dimana untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta terhadap masalah-masalah dan peluang pemecahan secara sistematis.

g. Analisis asumsi adalah suatu teknik yang bertujuan mensintesiskan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta secara kreatif asumsi-asumsi yang bertentangan dengan masalah kebijakan.

h. Pemetaan argumentasi adalah suatu teknik yang menggabungkan pendapat-pendapat dengan informasi kebijakan yang sama terhadap KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, akan menghasilkan pengetahuan yang bertentangan.

2. Peramalan Kebijakan adalah suatu teknik yang meyediakan pengetahuan yang *relevan* dengan kebijakan tentang pelaksanaan KTP *Online* serta masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari di ambilnya alternatif. Ramalan mempunyai tiga bentuk utama yaitu :

   a. *Proyeksi* adalah suatu teknik ramalan yang didasarkan atas kecenderungan masa lalu tentang pembuatan KTP, masa kini ke masa depan yang telah menggunakan KTP *Online* di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan dapat diperkuat dengan pendapat-pendapat para otoritas.

b. *Prediksi* adalah suatu teknik ramalan yang berdasarkan pada asumsi teoretik yang tegas terhadap pelaksanaan KTP *Online* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

c. Perkiraan adalah suatu teknik yang didasarkan pada penilaian informasi atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan yang telah menggunakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

3. Rekomendasi Kebijakan adalah suatu teknik untuk menambah pengetahuan yang *relevan* kebijakan tentang manfaat atau biaya dari pelaksanaan KTP *Online* dan berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diterapkan melalui peramalan. Rekomendasi ada beberapa model pilihan yaitu :

a. Pengambilan Keputusan Tunggal adalah suatu teknik pilihan yang harus dibuat oleh satu orang saja, dan dapat mempengaruhi orang banyak terhadap berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

b. Kepastian adalah suatu teknik hasil KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta menjadi pilihan yang harus diketahui dengan pasti.

c. Kecepatan adalah suatu sikap dalam bertindak untuk mengetahui hasil KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta tindakan harus segera terjadi.

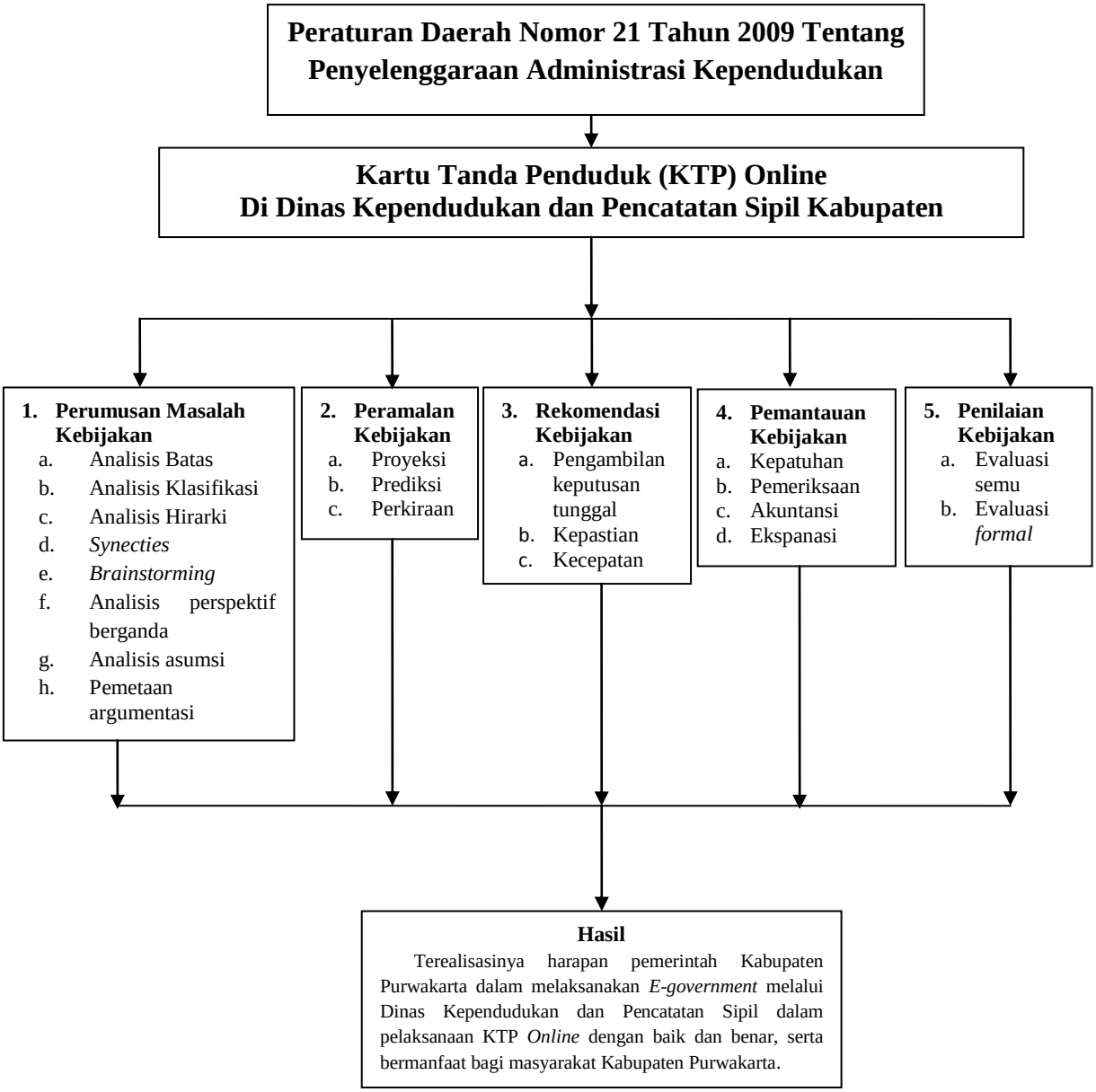
4. Pemantauan Kebijakan adalah suatu kegiatan penyediaan pengetahuan yang diambil dari kebijakan pelaksanaan KTP *Online* sebelumnya. Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu :
   a. Kepatuhan adalah suatu sikap dimana akan untuk menentukan apakah tindakan para aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sesuai standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator.
   b. Pemeriksaan adalah suatu kegiatan dimana akan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran.
   c. Akuntansi adalah suatu kegiatan *monitoring* dimana akan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi setelah diterapkannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.
   d. *Ekplanasi* adalah suatu kegiatan pemantauan untuk mengumpulkan informasi tentang KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta serta dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda.
5. Penilaian Kebijakan adalah suatu teknik dimana akan membuahkan pengetahuan yang *relevan* dengan kebijakan pelaksanaan KTP *Online* tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan

dengan yang benar-benar yang dihasilkan. Ada dua pendekatan dalam Penilaian Kebijakan.

a. Evaluasi Semu adalah suatu hasil penilaian kebijakan dimana akan menghasilkan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan penerapan *KTP Online*.
b. Evaluasi *Formal* adalah suatu teknik dimana akan menghasilkan informasi *valid* dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar program kebijakan.

Berdasarkan pada teori, konsep, definisi operasional dan indikator-indikator di atas, peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan, dengan begitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif.

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih (Soehartono, 2002:35).

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Sofian Effendi metode penelitian kualitatif adalah:

> "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (Effendi, 2005:9).

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu. Hal ini berhubungan antar dua gejala atau lebih yang terdapat pada objek yang diteliti.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu :

1. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai analisis kebiajakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
2. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi melalui komunikasi percakapan yang dilakukan saling berhadapan ataupun bisa melalui telepon. Peneliti mewawancarai aparatur yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dengan cara melakukan tanya jawab kepada aparatur, yang mengetahui dan untuk memahami lebih jauh analisis kebiajakan KTP *online* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
3. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mencari buku-buku mengenai pegangan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan *E-Government* melalui KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
4. Dokumentasi yaitu mencari data menganai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen kebijakan-kebijakan yang terkait dengan KTP *Online.* Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai analisis kebijakan *KTP Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

1.6.3 Teknis Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Rahardjo Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*: Berbagai Alternatif Pendekatan dapat diartikan sebagai berikut: "mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya"(Nasution, 2003:5). Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknis analisis data yang dikemukakan buku yang berjudul *Analisis Data Kualitatif*: sumber tentang metode-metode baru.

1. Data *Reduction* (reduksi data) sebagai proses pemilihan, penyerderhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dilapangan, reduksi data sesudah dilakukan semenjak pengumpulan data.
2. Data *Display* (penyajian data) merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang diantara lain terkait dengan pelaksanaan program Peningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3. *Conclusion Verivication* (penarik kesimpulan) yaitu berdasarkan reduksi interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*spesific*) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (*general*)

(Miles dan Huberman 1992:15-20).

Pengertian analisis data tersebut menurut Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul *Analisis Data Kualitatif*: adalah satu data yang harus

dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Data yang di analisis oleh peneliti adalah data kualitatif.

1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik dalam penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut Masri Singarimbuan, teknik pengambilan sampel *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (Singarimbuan, 1995:26).

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan KTP *Online* Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang terdiri dari :

1. Dua orang Staf Bagian informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta. Beliau adalah orang yang mengetahui tentang analisis kebijakan *E-Government* melalui KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
2. Satu orang Staf Bidang Informasi dan Analisis Hubungan Antar Lembaga (HUBTARGA) Setda Kabupaten Purwakarta sebagai orang yang mengetahui

tentang analisis kebijakan, pelaksana dalam KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

3. Tiga orang Staf Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang mengetahui tentang analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
4. Dua orang Masyarakat yang terdiri dari pelaksana program baik pemerintah maupun pihak pelaksanan yang ditunjuk di Kabupaten Purwakarta.
5. Satu Staf Bagian Informasi di Diskominfo Kabupaten Purwakarta sebagai pakar ICT yang ikut merumuskan kebijakan penerapan KTP Online di Kabupaten Purwakarta.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jl. Mr. Dr. Kusumahatmaja No. 8 Telp. (0264) 200640 dan Diskominfo Kabupaten Purwakarta. Waktu penelitian dimulai dari Bulan Maret 2011 sampai Juli 2011 yang diawali dengan pembuatan usulan penelitian skripsi, penyusunan laporan penelitian sampai penggandaan skripsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

waktu / Kegiatan	Tahun 2011							
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Ags**
Studi Pustaka								
Pendahuluan								
Pengajuan Judul Penelitian								
Bimbingan Usulan Penelitian								
Seminar Usulan Penelitian								
Pengajuan surat ke tempat penelitian								
Pelaksanaan Penelitian								
Pengumpulan data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi								
Pengolahan Data & Analisis Data								
Penulisan Skripsi								
Sidang Skripsi								